

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM DINAMIKA POLITIK

Muhammad Fadhil¹, Ilham Hudi², Asrini³, Putri Rama Sari⁴, Ajeng
Sofiantini⁵, Angguni Desilva Sari⁶, Dwindi Kayla Amarta⁷,
Rahma Dini Putri⁸

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis; Universitas
Muhammadiyah Riau^{1,2,3,4,5,6,7,8}
Email: muh.fadhil013@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila yang mewakili semangat dan nilai-nilai historis bangsa tidak pernah luput pengimplementasiannya dari setiap kegiatan masyarakat Indonesia, termasuk dalam dunia perpolitikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pengimplementasian nilai-nilai pancasila dalam dinamika berpolitik di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan metode studi literatur yaitu seperti membaca artikel dan jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Nyatanya nilai-nilai pancasila sampai sekarang belum dapat diimplementasikan secara keseluruhan dalam dunia politik Indonesia. Begitu banyak kegiatan politik yang dilakukan di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila. Selain itu pelanggaran sila-sila dalam pancasila seakan-akan merupakan hal yang sudah lumrah terjadi sekarang sehingga nilai-nilai pancasila tersebut hanyalah menjadi pajangan semata.

Kata Kunci: nilai-nilai pancasila, dinamika politik, pengaruh

ABSTRACT

Pancasila, which represents the spirit and historical values of the nation, has never failed to be implemented in every activity of Indonesian society, including in the world of politics. This research aims to explore the implementation of Pancasila values in the dynamics of politics in Indonesia. The approach taken in this research uses a qualitative approach. Data for this research was collected using the literature study method, namely reading articles and journals related to the research problem. In fact, the values of Pancasila have not yet been fully implemented in the world of Indonesian politics. There are so many political activities carried out in Indonesia that are not in accordance with the noble values contained in Pancasila. Apart from that, violations of the principles of Pancasila seem to be something that is commonplace now so that the values of Pancasila are just a display.

Keywords: *Pancasila values, political dynamics, influence*

PENDAHULUAN

Menurut (Ruslan, dalam Sabilla Febriany & Anggraeni Dewi, 2021) Pancasila merupakan sebuah konsep pemikiran yang menjadi dasar bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap aspek yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila adalah kristalisasi nilai luhur bangsa Indonesia semenjak zaman dahulu.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi dasar pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan dasar filsafat, sikap hidup masyarakat, dasar negara, ideologi, kekuatan pemersatu bangsa, dan sumber dari segala hukum negara. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib ikut menerapkan nilai-nilai Pancasila dari waktu ke waktu, masa ke masa, dan dari generasi ke generasi agar kelestarian dan kebudayaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terwujud. Pancasila dipilih sebagai dasar negara tentunya sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia, karena di dalam setiap sila Pancasila pasti terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara itu sendiri. (Agus, dalam Sari & Najicha, 2022)

Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dimana mengacu dalam tujuan yang satu (Aminullah, 2015). Kelima sila Pancasila tidak dapat diamalkan secara terpisah karena masing-masing sila saling berkaitan. Sejarah telah menunjukkan bahwa Pancasila adalah pedoman rakyat Indonesia yang memberikan vitalitas kepada masyarakat Indonesia dan membimbing dalam menjalani kehidupan yang lebih baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adhayanto (2015), menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara terbukti mampu menjadi media pemersatu bangsa (Sabilla & Dewi, 2021). Namun saat ini banyak pemimpin negara yang bertindak terlalu jauh dan tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jika kita menerapkan sila pertama Pancasila (ketuhanan yang maha esa) maka sila-sila berikutnya akan juga diterapkan dalam kehidupan dan jauh dari yang namanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Tanpa mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila, maka akan timbul persoalan-persoalan yang kurang baik seperti konflik dan perbedaan pendapat.

Peran Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara adalah untuk menjadi kunci bagi terbangunnya stabilitas nasional, melalui nilai-nilai yang

terkandung dalam pancasila akan terjalin kehidupan harmoni agama, politik, sosial, budaya, dan juga ekonomi didalam kemajemukan masyarakat (Sagala & Nasution, 2022). Maka dari itu, untuk menghindari konflik sosial, budaya, agama dan juga ekonomi yang dapat terjadi dalam masyarakat, penting untuk menanamkan pendidikan pancasila kepada generasi muda bangsa. Penyimpangan dan konflik yang terjadi disekitar kita sebenarnya berawal dari tidak menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sejak dini. Selain itu menurut (Sianturi & Dewi, 2021) Pendidikan pancasila dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. Penerapan atau penanaman nilai-nilai setiap butiran pancasila harus diajarkan agar individu memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan karakter luhur bangsa dan tidak menyimpang dari nilai pancasila yang sesuai dengan sila-sila dalam pancasila.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengumpulkan data deskriptif yang mendeskripsikan objek penelitian secara rinci dan mendalam dengan maksud mengembangkan konsep atau

pemahaman suatu masalah. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan metode studi literatur yaitu seperti membaca buku, artikel, jurnal, surat kabar dan laporan lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Politik dan Peranan Pancasila

Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Melihat definisi ini, maka hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat. (Deliar Noer dalam, B.Nambo & Muhamad Rusdiyanto puluhuluwa, 2005)

Dinamika politik erat kaitannya dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi telah lama dibahas, namun masih menjadi permasalahan, sebagian disebabkan oleh penafsiran yang partisan.

Menurut Slamet Santosa (2004) mengemukakan bahwa: "Dinamika

adalah Tingkah laku yang secara langsung memengaruhi warga lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan.

Dinamika Politik Menurut Dwiyanto (2002) dapat diartikan sebagai gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas. Dinamika politik memberi pandangan bahwa seni dan budaya lokal merupakan medium untuk mengekspresikan aspirasi dan kepentingan politik yang sangat penting bagi komunitas lokal.

Sensitifitas terhadap informalitas masyarakat merupakan cara dalam memahami dinamika politik. Hal yang mempengaruhi dan sering muncul dalam dinamika politik adalah Money politics (politik uang) yang semakin ternormalisasi sebagai tatanan baku dalam dinamika politik. Dengan adanya dinamika politik, maka kita mengetahui pergeseran yang terjadi dalam politik antara lembaga atau badan pemerintahan, serta dapat menganalisis pergerakan lembaga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan bahwa dinamika politik merupakan pergerakan politik dalam pemerintahan.

Kita sama sama sadar betapa tidak stabilnya dinamika politik yang

ada di Indonesia. Melihat dinamika politik yang tidak stabil itu, diperlukan suatu metode yang tepat untuk mengembalikan politik sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Politik yang sehat dan menjunjung persatuanlah yang dibutuhkan yaitu politik yang berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, sumber dari segala sumber hukum dan falsafah hidup menjadi solusi paling efektif untuk mengatasi kerusuhan dalam politik Indonesia. Sebagai suatu ideologi, Pancasila dibentuk melalui kajian kritis yang berkaitan dengan cita-cita dan kepribadian bangsa. Selain sebagai suatu ideologi, pancasila juga merupakan sebuah falsafah hidup. Falsafah hidup yang memberikan pedoman cara berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Pancasila bersifat memaksa dan mengikat. Pancasila bersifat memaksa karena wajib ditaati sebagai dasar dan sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan, hukum negara dan pemerintahan haruslah berlandaskan Pancasila. Semuanya dibentuk tanpa sedikitpun melenceng dari Pancasila. Selain itu, Pancasila juga bersifat mengikat. Artinya, setiap warga negara Indonesia terikat pada keharusan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dalam upaya pengimplementasiannya, diperlukan pemahaman akan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Karena yang sering terjadi adalah salah paham

akan makna yang terkandung dalam Pancasila.(Sabilla & Dewi, 2021)

B. Implementasi Pancasila dalam dinamika politik di Indonesia

Dalam rangka mewujudkan politik bersih, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu diimplementasikan dalam setiap kegiatan politik. Baik politik yang dilakukan oleh pemerintahan negara, maupun politik yang dilakukan oleh organisasi, lembaga, bahkan perorangan. Jika semua warga negara memahami nilai nilai itu dan mengimplementasikannya, maka kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan berjalan harmonis.

Berikut akan dijabarkan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik.

1. Ketuhanan yang maha esa
Sila pertama memaparkan bahwa dalam kegiatan berpolitik, politik hendaknya menjunjung tinggi moral. Nilai moral tertinggi berdasar pada nilai – nilai ketuhanan. Sedangkan moral keagamaan sendiri bersumber pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Indonesia adalah negara yang memiliki kebebasan dalam menganut keyakinan baik suku raa adat dan yang terpenting agama dikarenakan di Indonesia mengakui beberapa agama sehingga kebijakan politik tidak boleh memihak atau hanya memberi keuntungan atau mengistimewakan hanya satu agama saja.

Kekuasaan bukanlah segala-galanya, terutama dalam menganggap bahwa kekuasaan di salah gunakan

untuk kepentingan pribadi seperti mencari kekayaan (korupsi). Kekuasaan adalah alat untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara, alat untuk mensejahterakan rakyat, alat untuk mengangkat yang miskin menjadi sejahtera, dan hal-hal lain yang positif. Oleh karena itu, kekuasaan atau politik harus bersandar kepada Pancasila terutama sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa). Setiap aktivitas politik apapun harus dinskyafi bahwa Tuhan senantiasa melihatnya. Dengan demikian, tidak ada ruang sedikit pun untuk menggunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi, terlebih menghalalkan segala cara.

Berdasarkan beberapa pemaparan pembahasan diatas dapat di simpulkan bagaimana cara menerapkan kandungan nilai Pancasila Sila Pertama. Berikut penerapan beberapa kandungan nilai sila pancasila di bidang politik

1. Anggota Dewan atau para pejabat tidak melakukan tindakan kecurangan dalam menjalankan tugasnya (memanipulasi kebijakan)
2. Calon dewan atau calon presiden dan wakil tidak membeli suara dalam pemilihan umum.
3. Pejabat tidak melakukan korupsi yang merugikan rakyat (pemotongan anggaran bantuan sosial, korupsi dana APBN)
4. Tidak menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan politik.
5. Pemerintah tidak memihak/cenderung aktif pada satu agama/ salah satu organisasi.

Implementasi sila pertama ini lebih cenderung pada sikap para calon perwakilan rakyat yang harus memberikan contoh yang tidak keluar dari agama masing – masing. nilai yang terkandung seperti jujur pada diri sendiri dan jujur dengan hasil akhir pemilihan yang akan terjadi. tidak melakukan hal – hal yang licik atau menjatuhkan lawan.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut.

Pada Sila kedua ini, telah dicantumkan dengan jelas bahwasanya setiap kegiatan politik untuk bangsa dan negara harus mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya sila kemanusiaan yang adil dan beradab seharusnya mampu menjadi pengingat terhadap pelaksanaan politik di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang yang memanusiaikan manusia, serta bangsa berkeadilan.

Rasa kemanusiaan harus terus dipupuk, dipelihara dan dikelola dengan baik. Karena dengan adanya rasa kemanusiaan, praktik-praktik politik yang licik dan merugikan manusia lainnya akan minim terjadi. Penguasa tidak akan mau mengorbankan rakyatnya demi keuntungan pribadi.

Dan rakyat tidak akan menjatuhkan penguasanya yang adil. Rasa kemanusiaan ini agaknya kian hari kian berkurang. Terlihat dari maraknya berita palsu, fitnah, saling menghujat antar warga negara demi hanya untuk menduduki suatu kekuasaan. Dapat dibayangkan, jika dalam upaya perolehan posisi di pemerintahan saja sudah berani mengesampingkan rasa kemanusiaan, apalagi jika nantinya telah menduduki posisi itu. Pemimpin yang otoriter, kabinet yang ricuh, rakyat yang tertindas dan tak berdaya akan menjadi plot yang menyedihkan dalam perjalanan negara Indonesia.

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga berbunyi “persatuan indonesia” yang mengandung arti makna persatuan dan persatuan rakyat Indonesia untuk membina rasa nasionalisme dan mengutamakan persatuan seluruh Indonesia, menghargai agama, suku, budaya dan ras, juga rela berkorban untuk negara dan bangsa.

Lalu bagaimana dengan Bidang Politik kita. Sekarang yang paling sering terjadi di Indonesia dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya yaitu politik identitas. Politik identitas adalah sebuah alat yang digunakan untuk kepentingan individu maupun sekelompok orang yang sama baik dari etnis, suku, budaya, gender, maupun agama. Politik identitas ini dipengaruhi oleh hausnya kepemimpinan dari seorang individu tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri pastinya setiap individu menginginkan kesejahteraan yang bisa didapat dengan

berbagai cara dan sesungguhnya kesejahteraan bagi setiap individu itu bersifat relatif. Namun dari prosesnya itu tidak semua individu bisa menempati posisi tersebut, maka dari itu terdapat persaingan untuk mendapatkan posisi tersebut menuju kesejahteraan yang menjadi tujuan dasar yang hendak dicapai.

Politik Identitas tentu bertentangan dengan sila ketiga yaitu "Persatuan Indonesia", Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, Pengakuan terhadap ke-"Bhineka Tunggal Ika"-an, suku bangsa dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa). Pancasila merupakan dasar negara yang merangkul seluruh perbedaan, dan memfilter isu isu ras, suku, dan agama, dimana di Indonesia isu isu ras, suku, dan agama sangat marak terjadi maka dari itu pancasila berperan penting dalam melawan politik identitas.

Setiap orang memiliki politik Identitasnya masing-masing, tetapi jika porsi politik identitas berlebihan pada suatu individu maupun kelompok. Politik identitas di Indonesia kian marak terjadi karena ada kepentingan dari beberapa individu maupun kelompok. Selain politik identitas, juga terdapat politik pencitraan. Kita kembali pada Pilpres 2019 kemarin, dimana pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 telah terjadi peristiwa yang tidak

biasanya. Manakala pada saat itu, massa pemilih seolah-olah terbagi kepada dua bagian atau kubu, mengingat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang masuk dalam bursa pencalonan sebanyak dua pasangan, yakni pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, sedangkan yakni pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Menjelang perhelatan kontestasi demokrasi tersebut, berseliweran isu politik yang dianggap kurang baik, sebab hal ini mempertaruhkan nilai keutuhan bangsa itu sendiri. Pada saat itu muncul jargon yang menyuarakan "Saya Pancasila, Saya Indonesia" yang kemudian disemarakkan oleh pendukung salah satu pasangan calon yang seolah-olah secara tidak langsung memberikan sinyal klaimisasi salah satu kelompok saja yang benar, hanya yang menjadi bagian dari merekalah yang mengakui Pancasila sebagai Ideologi, serta menyalahkan massa atau kubu yang lain.

Hal ini tentu saja sangat berbahaya dan mengancam persatuan dan kesatuan, ketika satu golongan menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan golongan atau kelompok yang lain, terlebih dinamika tersebut tidak hanya terjadi pada masa politik saja melainkan berlanjut ke dalam wilayah sosial, hal ini terlihat dari obrolan di warung kopi ataupun perdebatan dan tweet yang berseliweran di sosial media.

Padahal, aktivitas politik beserta aktor-aktor didalamnya dianggap sebagai yang paling bertanggungjawab dalam mengawal dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila demi terjaminnya kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dengan benar-benar menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, bukan malah sebaliknya diawali dengan cara-cara yang bernuansa hanya sebatas “pencitraan” demi sebuah tujuan kepentingan kelompok tertentu. (Rizal, 2021)

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Sila keempat menggambarkan dengan jelas bagaimana negara Indonesia menjadikan demokrasi dan musyawarah sebagai sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia. Dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Permusyawaratan/ Perwakilan ini ditegaskan pula bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang sesungguhnya berkuasa atas negara Indonesia. Itu artinya seluruh rakyat juga berhak untuk menjadi pemimpin di pemerintahan. Pemilu sebagai salah satu contoh dari produk zaman reformasi menjadi salah satu contoh implementasi nilai-nilai pancasila dalam sila keempat yang intinya adalah musyawarah mufakat. Dalam proses politik dan pemilihan kepala negara dan daerah kita selalu menggunakan sistem pemungutan suara dan suara setiap masyarakat sama besarnya.

Indonesia yang memakai sistem pemerintahan demokrasi juga membuka peluang sebesar-besarnya bagi rakyat yang ingin memasuki pemerintahan. Namun dalam prakteknya pemerintahan tidaklah dipimpin oleh seluruh rakyat yang ada dari Sabang hingga Merauke. Tetapi dilakukan oleh perwakilan perwakilan tiap daerah. Para wakil wakil itulah yang akan menyampaikan aspirasi rakyat.

Akan tetapi dalam prakteknya, pelaksanaan Pilkada langsung terdapat kritik lantaran Pilkada yang seharusnya sebagai sarana demokrasi politik bagi rakyat akan tetapi berjalan tidak sebagaimana mestinya. Kritik yang mengemuka antara lain dalam beberapa kasus, aspirasi rakyat tidak lagi menjadi penentu utama dalam memunculkan calon kepala daerah yang akan memimpin daerah selama lima tahun periode pemerintahan. Akan tetapi, penentuan kepemimpinan kepala daerah secara dominan banyak ditentukan oleh elit politik yang berkuasa. Pada titik ini, Pilkada disebut menyebabkan fenomena oligarki, klientelisme politik dan Politik Dinasti. (Suryadi & Sos, 2022)

Selain itu dalam kenyataan di lapangan, para wakil-wakil ini tidak menjalankan amanah yang diembannya dengan baik. Kekuasaan yang diperoleh seolah menghipnotis tujuan awal yaitu penyambung aspirasi rakyat. Seringkali ditemui wakil-wakil rakyat yang memberikan janji-janji manis nan palsu. Hal seperti inilah yang akhirnya

membuat pemerintah kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Politik pun hanya dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan yang sepihak. Kekuasaan yang hanya memberikan keuntungan pribadi. Kita dapat mengingat salah satu contoh yang baru baru ini terjadi di pemerintahan, dimana salah satu hakim agung negara yang membuat kebijakan yang jelas-jelas sangat kontroversial dengan maksud untuk melakukan nepotisme dan mengindikasikan pendirian politik dinasti yang turut menjerat presiden ke tujuh Indonesia sekarang. Kejadian seperti ini tentu membuat masyarakat bingung sekaligus geram apakah tidak ada lagi lembaga pemerintahan yang dapat dipercaya di negeri ini.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan di Indonesia ini sudah tidak terjalankan dengan baik dan benar. Keadilan kembali menjadi bagian penting dalam terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara. keadilan yang adil bagi seluruh rakyat, bukan hanya penguasa. Sila ke 5 ini harus kita pahami bahwa keadilan merupakan hak seluruh rakyat indonesia, bukan hak petinggi Indonesia.

Setiap hal yang dilakukan dengan berdasarkan sila ke 5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia) maka akan terciptakan kehidupan yang penuh dengan keadilan dan tidak akan ada rakyat yang protes terhadap pemerintah dalam keadilan di Indonesia. Secara khusus, nilai kelima

Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam mewadahi kesenjangan sosial sehingga seluruh rakyat Indonesia mempunyai kesetaraan sosial untuk mewujudkan pembangunan kehidupan yang adil dan seimbang, dan mencakup semua kalangan, sehingga semua kelompok sosial di Indonesia menikmatinya. Sesuai sila kelima Pancasila, permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini sangat merugikan banyak pihak, yaitu pengangguran dan rendahnya kualitas pendidikan.

Dari kelima nilai pancasila, pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 bersumber pada nilai pancasila tentang keadilan yang terdapat pada sila ke 5. Salah satu contoh tidak terlaksananya keadilan di Indonesia ini, seperti hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui hukum di Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila. Konsep keadilan yang sebenarnya yaitu membela yang benar dan memberi sanksi pada orang yang salah. Jika suatu negara menerapkan konsep keadilan yang sebenarnya, pasti suatu negara akan mengalami kemajuan yang pesat. Namun bertolak belakang dengan hukum di Indonesia yang mana Uang mengatur segalanya.

Marcus Tullius Cicero ahli hukum bangsa Roma menyatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hal ini sama pengertiannya dengan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat.

Keberadaan hukum adalah deskripsi filosofis bahwa Negara memiliki falsafah politik dalam mengukur nilai-nilai, keteraturan, keadilan, dan terpenuhinya kepentingan masyarakat yang harus diupayakan Negara. Dalam konteks yang sama, para pendiri bangsa telah memahami tentang perlunya falsafah politik yang sesuai bagi Negara Indonesia, para pendiri bangsa menggunakan rumusan Pancasila. Negara memerlukan falsafah politik karena pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari suatu pandangan bahwa Negara merupakan persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan yang juga merupakan masyarakat hukum. Artinya hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat.

Perubahan makna Pancasila tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, namun juga dilakukan oleh penguasa. Dalam beberapa kasus, Pancasila secara sistematis digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga juga melemahkan eksistensi Pancasila.

C. Manfaat Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Dinamika Politik
Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dinamika politik dapat membawa berbagai manfaat, di antaranya:

1. Menciptakan iklim politik yang sehat dan demokratis
Implementasi nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan sosial, musyawarah mufakat, dan persatuan dan kesatuan dapat menciptakan iklim

politik yang sehat dan demokratis. Demokrasi dapat berjalan dengan baik, setiap warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik, dan tidak ada kesenjangan yang terlalu besar antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin.

2. Meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara
Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara dapat hidup dengan aman, damai, dan sejahtera, serta tercipta rasa persatuan dan kesatuan yang kuat di antara seluruh masyarakat Indonesia.

D. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Dinamika Politik

Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dinamika politik masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:

1. Maraknya politik identitas
Politik identitas merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dinamika politik. Politik identitas yang mengedepankan kepentingan kelompok tertentu dapat menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat.

2. Korupsi dan kolusi
Korupsi dan kolusi juga merupakan tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dinamika politik. Korupsi dan kolusi dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila juga menjadi tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dinamika politik. Masyarakat perlu dididik dan dibina agar dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dinamika politik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dinamika politik. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya:

1. Pendidikan dan pembinaan masyarakat

Pendidikan dan pembinaan masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila perlu terus ditingkatkan. Pendidikan dan pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

2. Penegakan hukum yang tegas
Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dan kolusi juga perlu dilakukan. Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten, tanpa pandang bulu.

3. Penyebarluasan informasi
Penyebarluasan informasi mengenai nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan secara masif dan sistematis. Informasi mengenai nilai-nilai Pancasila dapat disebarluaskan melalui berbagai media,

seperti media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan sosial.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, sumber dari segala sumber hukum haruslah dihidupkan kembali. Menghidupkan nilai-nilai pancasila tersebut dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, tak terkecuali kedalam kehidupan berpolitik.

Agar negara kita ini tidak kehilangan arah, pancasila sebagai dasar dan sumber filsafat negara harus diimplementasikan kedalam dinamika politik Indonesia. Sistem politik yang dilandasi dengan nilai-nilai pancasila tentu akan menghasilkan produk politik seperti kebijakan ataupun pemimpin yang menjunjung tinggi pancasila dan mengerti bagaimana menjalankan negara sesuai amanat pancasila dan undang-undang dasar 1945. Implementasi ini tentu saja tidak terbatas pada dunia politik. Kita sebagai warga negara tentu juga harus mengamalkan nilai pancasila dengan menjadi warga negara yang paham baik atau buruknya dinamika politik yang terjadi di negara kita dan terus menyuarakan jika terjadi penyimpangan nilai-nilai pancasila.

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki lima sila yang mengandung

nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dinamika politik. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dinamika politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi

Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, seperti kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, dan kebebasan berpendapat, harus menjadi landasan dalam pelaksanaan dinamika politik di Indonesia. Demokrasi harus dijalankan secara jujur, adil, dan transparan, sehingga setiap warga negara dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik.

2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

Nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, seperti persamaan derajat, persaudaraan, dan keadilan sosial, harus menjadi dasar dalam hubungan antarwarga negara, termasuk dalam dinamika politik. Setiap warga negara harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan.

3. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial

Nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, seperti pemerataan kesejahteraan, perlindungan kepada kaum lemah, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, harus menjadi tujuan dalam pelaksanaan dinamika politik di

Indonesia. Pemerintah harus berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ada kesenjangan yang terlalu besar antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin.

4. Mengedepankan musyawarah mufakat

Nilai musyawarah mufakat yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi prinsip dalam pengambilan keputusan politik. Setiap keputusan politik harus diambil melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

5. Mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan

Nilai persatuan dan kesatuan yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika politik harus dilaksanakan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan, sehingga tidak menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 3(1), 620–628.
- B.Nambo, A., & Muhamad Rusdiyanto puluhuluwa. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21(2), 262–285.

- Rizal, L. F. (2021). Pancasila dalam Politik Pencitraan di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(2), 17–30. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.12499>
- Sabilla, A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Ranah Politik. *EduPsyCouns Journal*, 3, 154–162.
- Sabilla Febriany, F., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Nilai-Nilai Pancasila dan Dinamika Etika Politik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(04), 690–695. <https://doi.org/10.59141/japendi.v2i04.139>
- Sagala, C. S. T., & Nasution, M. (2022). Implementasi Pancasila di Tahun Politik. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2), 113–126. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.206>
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 7(1), 53–58. <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>
- Sianturi, Y. R. U., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Dan Sebagai Pendidikan Karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 222–231. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1452>
- Suryadi, R., & Sos, S. (2022). Analisis Kritis Implementasi Sila Keempat Pancasila Dalam Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums 2022*, 146–158.
- Santoso, Slamet. 2004. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press